

# RENCANA KERJA (RENJA) 2022

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



JL. Beringin II No.35 Telp.(0721) 481301 TelukBetung 35222  
Email : [bkd.lampungprov@gmail.com](mailto:bkd.lampungprov@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2021 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat lebih sempurna lagi.

Bandar Lampung, 2021

**Pit.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**



**YURNALIS, S.IP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690710 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3.1. Maksud.....	4
1.3.2. Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Lampung .....	6
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	14
<b>BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....</b>	<b>20</b>
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra BKD.....	21
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2021.....	22
<b>BAB IV Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra .....</b>	<b>25</b>
4.1. Indikator Kinerja dan Target Capaian Renstra .....	25
<b>BAB V Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju</b>	

Berdasarkan Pagu Indikatif.....	26
<b>BAB VI Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan</b>	
<b>Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB VII Penutup.....</b>	<b>28</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) PERANGKAT DAERAH sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen RENJA SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen RENJA ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENJA SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan RENJA SKPD, orientasi mengenai RKPD dan RENJA SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan RENJA SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *existing* SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD tahap penetapan rancangan akhir. Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan RENJA SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan RENJA SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 8) Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

- 9) Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4 Sistematika Dokumen Renja**

#### **BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah**

##### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah**

##### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah**

##### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
PERANGKAT DARAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan  
Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA

4.1 (Matriks / Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan  
Pendanaan Indikatif, Lokasi Indikator, Target dan Prakiraan Maju) dengan  
Nomenklatur sesuai Renstra OPD Tahun 2019-2024

4.2 Matriks Kepemerintahan dalam Negeri No.50-3708

BAB 5 DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU  
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BAB 6 SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 7 PENUTUP

## **BAB 2**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian daerah**

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 terdiri dari 7 program dan 43 kegiatan, yaitu:

1. **Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 2.106,674,707,- dengan realisasi anggaran sebesar 93,62% dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya listrik, air dan telepon, dengan capaian realisasi 77,53%.
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan  
Output kegiatannya adalah honorarium pengelola keuangan SKPD, dengan capaian realisasi 91.82%.
  - c. Penyediaan alat tulis kantor  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, dengan capaian realisasi 99.98%.
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kantor, dengan capaian realisasi 96,41%.
  - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor, dengan capaian realisasi 100%.
  - f. Penyediaan peralatan rumah tangga dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Output kegiatannya adalah terpenuhinya peralatan rumah tangga , dengan capaian realisasi 99.62%.

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi, dengan capaian realisasi 99,93%.

h. Penyediaan makanan dan minum  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai, dengan capaian realisasi 99,88%.

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
Output kegiatannya adalah dapat mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan di luar daerah, dengan capaian realisasi 99,98%.

j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran  
Output kegiatannya adalah honorarium PNS dan Non PNS, dengan capaian realisasi 96,99%.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 618.114.600,- dengan realisasi anggaran sebesar 95,46% dengan kegiatan:

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
Output kegiatannya adalah terpenuhinya perlengkapan gedung kantor, dengan capaian realisasi 93.85%.

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional  
Output kegiatannya adalah tersedianya BBM, Pelumas, dan Accu bagi kendaraan Dinas/ Operasional, Dengan capaian realisasi 94,44%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
Output kegiatannya adalah pemeliharaan peralatan kantor, dengan capaian realisasi 97.47%.

3. **Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 89.864.900,- dengan realisasi anggaran sebesar 97.55% dengan kegiatan:

a. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja

Output kegiatannya adalah tersusunnya jumlah dokumen perencanaan

penyusunan laporan evaluasi kinerja target kinerja, dengan capaian realisasi 92.12%

b. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan

Output kegiatannya adalah tersusunnya jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, target kinerja, dengan capaian realisasi 99,84%.

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Output kegiatannya adalah tersusunnya dokumen perencanaan BKD, dengan capaian realisasi 98,97%.

4. **Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 1.822.876.325,- dengan realisasi anggaran sebesar 92.55% dengan kegiatan

**a. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)**

Output kegiatan ini adalah jumlah orang dalam pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat, pindah golongan, dan penyesuaian ijazah Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dengan capaian realisasi sebesar 97,44%.

**b. Pembinaan Fasilitas Seleksi IPDN dan Tugas Belajar**

Output kegiatan ini adalah penetapan calon Praja IPDN yang dinyatakan lulus seleksi dan PNS yang akan mengikuti tugas belajar, dengan capaian realisasi sebesar 81,1 %.

**c. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil**

Output kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi dengan target kinerja, dengan capaian realisasi sebesar 80,66%,

**d. Penataan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi**

Output kegiatan ini adalah jumlah nominatif pejabat struktural yang diangkat dipindahkan atau diberhentikan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, dengan realisasi sebesar 98,24%

**e. Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional**

Indikator atau output kegiatan ini adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional, dengan realisasi sebesar 99,88%

5. **Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 331.901.500,- dengan realisasi anggaran sebesar 83.55% dengan kegiatan:

**a. Pembinaan Organisasi Profesi ASN**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI, dengan realisasi sebesar 73,80%

**b. Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung dengan realisasi sebesar 98,53%

**c. Pembinaan Disiplin Pegawai**

Indikator atau output kegiatan ini adalah evaluasi pembinaan disiplin dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan realisasi sebesar 94,24%

6. **Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai** dengan anggaran sebesar Rp. 5.438.725.444,- dengan realisasi anggaran sebesar 82.55% dengan kegiatan:

**a. Pemberhentian Pegawai**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang akan Pensiun, target kinerja 693 dokumen, dengan realisasi sebesar 56,49%

**b. Pengadaan dan Pengurusan Administrasi ASN**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS. dengan realisasi sebesar 89,35%

**c. Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas pegawai dari dalam maupun dari luar kabupaten/kota dan Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan realisasi sebesar 94,47%

7. **Program Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian** dengan anggaran sebesar Rp. 146.026.450,- dengan realisasi anggaran sebesar 82.55% dengan kegiatan:

**a. Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian**

Indikator atau output kegiatan ini adalah dokumen kepegawaian di SIMPEDU dan SAPK yang akurat. dengan realisasi sebesar 98,81%

**b. Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan guna untuk mengetahui keadaan kepegawaian yang ada pada Provinsi Lampung dengan realisasi sebesar 99,98%

**c. Penataan Sistem Administarsi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala**

Indikator atau output kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober dan Surat Kenaikan Gaji Berkala dengan realisasi sebesar 99,80%

BKD Provinsi Lampung dalam melaksanakan kinerjanya menopang Indikator Kinerja Utama (IKU), melalui 2 sasaran dimana sasaran tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan oleh BKD Provinsi Lampung. Pada Tahun 2020 target Kinerja sasaran Pertama sebesar 60% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan 64.82%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Pada sasaran kedua target kinerja sebesar 40% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 50%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi
1	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	64.82%
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	50%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian; dan
- e. Pengelolaan administratif.

Adapun penjabaran dari fungsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis, Pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

- j. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayah Provinsi;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung perlu didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, termasuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan administrasi Kepegawaian antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan dengan pemerintahan Pusat.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah**

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh isu – isu strategis, isu – isu strategi tersebut antara lain :

Isu strategis yang dihadapi BKD Provinsi Lampung antara lain :

1. Pemetaan pegawai di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebutuhan Anjab/ABK yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur No.G/437/B.59/HK/2018 tetapi baru sesuai kualifikasi jenjang pendidikan dan sebaiknya penempatan ASN berdasarkan kompetensi;
2. Sistem kinerja pegawai provinsi Lampung sudah berbasis kinerja tetapi harus tetap melakukan pengembangan kinerja berbasis kompetensi;
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan sistem pelayanan yang bersifat *online*.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ada 7 point pada arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2022,yaitu :

1. Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
2. Sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal
3. Perlindungan sepanjang hayat dan adaptif
4. Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan (infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)
5. **Birokrasi yang profesional dan berintegrasi dengan penguatan SDM**
6. Reformasi penganggaran pusat dan daerah

7. Penguatan data (akurat, reliable dan terintegrasi)

Pada point ke 5 terkait Birokrasi yang professional dan berintegritasi dengan penguatan SDM selaras dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Reformasi sumber daya aparatur memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah. Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, permasalahan yang di hadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedikit mengalami hambatan, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik di lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu salah satunya ada adalah Profesionalisme ASN.

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BKD sebagai fungsi penunjang kepegawaian perlu melaksanakan pendistribusian pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.

1. Penempatan ASN belum berdasarkan kinerja dan kompetensi
2. Sistem kinerja pegawai provinsi lampung sudah berbasis kinerja tetapi harus tetap melakukan pengembangan kinerja berbasis kompetensi
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public
4. Pembinaan penempatan aparatur hendaknya berdasarkan birokrasi kebutuhan daerah kabupaten/kota dengan asas keadilan
5. Perlunya meningkatkan kesejahteraan aparatur, dengan meningkatkan tujuan kinerja

Dalam upaya menempuh Tujuan sasaran strategi serta arah kebijakan dengan Visi RAKYAT LAMPUNG BERJAYA dan Misi Mewujudkan “*Good Governance*” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik berikut tabel yang dapat disajikan :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>			
<b>MISI : Mewujudkan “<i>Good Governance</i>” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Profesionalisme PNS	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi  Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian	1. Pengadaan dan mutasi pegawai	1. Perencanaan formasi dan pengadaan pegawai
			2. Penyusunan pemetaan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK
			3. Harmonisasi pengajuan rencana kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB berbasis aplikasi
			4. Penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan

<b>VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>			
<b>MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			formasi yang kosong
			5. Penempatan PNS berdasarkan pemetaan kompetensi PNS sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah
		2.Pengembangan sumberdaya aparatur.	1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui promosi terbuka
			2. Pengisian Jabatan administrator dan pengawas sesuai kompetensi
			3. Pelaksanaan uji kompetensi PNS dalam rangka penyusunan pemetaan kompetensi
			4. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar
			5. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional tertentu
			6. Data nominative PNS yang akan mengikuti diklat
		3.Peningkatan Pem binaan dan kesejahteraan pegawai	1. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS
			2. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

<b>VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA</b>			
<b>MISI : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		4. Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data (Pengadaan, mutasi, kenaikan pangkat, e-kinerja, absensi, KGB, cuti, pensiun, e-JPT, e-JP).</li> <li>2. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur penunjang pelayanan kepegawaian</li> <li>3. Penyediaan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten</li> <li>4. Pemanfaatan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian</li> <li>5. Pengembangan ruang layanan kepegawaian di BKD</li> <li>6. Pengembangan aplikasi data dan informasi kepegawaian terintegrasi dalam SIMPEDU BKD Provinsi Lampung</li> <li>7. Adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kab/Kota</li> <li>8. Update dan validasi data secara berkala</li> <li>9. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi</li> </ol>

## **BAB 3**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional**

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan public, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJMN 2019-2024 masih terdapat beberapa isu strategis selama lima tahun kedepan, antara lain :

##### **1. Profesionalitas ASN**

Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum semua Provinsi dan Kabupaten / Kota menerapkan sistem merit, selanjutnya hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik . Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN , terutama luar jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu / fungsional belum berbasiskan sektor unggul kewilayahan. Selain itu masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian.

##### **2. Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik**

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur dan Layanan. Seain itu, penerapan inovasi pelayanan public

secara elektronik (e-service) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam.

Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan fungsional.
- b. Transformasi pelayanan publik melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik , penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan program dan kegiatan, tujuan, sasaran, arah kebijakan melalui tupoksi BKD Provinsi Lampung dalam periode lima tahun.
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan penunjang fungsi kepegawaian.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

### **3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun 2022:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yaitu :

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

##### **c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Kepegawaian Daerah**

Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
  - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

## BAB 4

### INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN RENSTRA SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Profesionalis me PNS	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	58%	79%	91%	100%

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2019-2024)

## **BAB 5**

### **DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 24.584.805.454,- yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dijabarkan atau diuraikan pada tabel berikut :

**BAB 6**

**SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN**

**UNTUK MENJALANKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Sumber dana yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan ialah menggunakan dana APBD sebesar Rp. 24.584.805.454,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.847.899.621,- yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.736.905.833,- yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2021, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Semoga dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 seluruh Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Urusan Pendukung							
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Ditingkatkan</b>						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	150,000,000	APBD	100%	109,020,952
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 dokumen	75,000,000	APBD	13 dokumen	57,445,763
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	75,000,000	APBD	9 dokumen	51,575,189
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	11,446,523,348	APBD	100%	12,935,378,925
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 bulan	11,420,273,348	APBD	14 bulan	12,632,191,425
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PWRI	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 dokumen	0	APBD	2 dokumen	275,625,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	BKD PROVINSI LAMPUNG	24 dokumen	26,250,000	APBD	24 dokumen	27,562,500
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana kantor yang ditingkatkan	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	1,229,786,810	APBD	100%	1,254,454,599
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen dan peralatan listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	142 buah	7,982,200	APBD	142 buah	8,382,638
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	157 unit	425,726,610	APBD	157 unit	532,285,016
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	BKD PROVINSI LAMPUNG	148 buah	8,400,000	APBD	148 buah	8,820,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetak dan penggandaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	803 buah	21,000,000	APBD	500 buah	22,050,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	15 buku	0	APBD	15 buku	3,307,500
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK	BKD PROVINSI LAMPUNG	1674 buah	40,000,000	APBD	1000 buah	33,512,472
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	25 kali	29,000,000	APBD	25 kali	27,562,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	61 kali	697,678,000	APBD	61 kali	618,534,473
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	865,202,565	APBD	100%	908,462,693
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 bulan	267,284,055	APBD	12 bulan	280,648,258
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 bulan	597,918,510	APBD	12 bulan	627,814,436

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	328,549,900	APBD	100%	329,248,395
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	25 unit/tahun	273,504,900	APBD	25 unit/tahun	263,870,145
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	43 unit/tahun	30,345,000	APBD	43 unit/tahun	31,862,250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 unit/tahun	24,700,000	APBD	1 unit/tahun	33,516,000
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditingkatkan</b>						
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian dan keakuratan data kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	70%	8,183,946,692	APBD	20%	7,258,286,284
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	7,261,841,940	APBD	9 dokumen	6,108,196,564
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	BKD PROVINSI LAMPUNG	615 orang	42,954,325	APBD	615 orang	55,714,286
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Jiwa Korsa Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	3 dokumen	643,055,327	APBD	3 dokumen	834,080,586
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Aplikasi serta Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat	BKD PROVINSI LAMPUNG	2 aplikasi	132,515,100	APBD	185 data	146,097,898
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang Akurat serta	BKD PROVINSI LAMPUNG	15000 dokumen	103,580,000	APBD	15000 data	114,196,950
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	70%	1,273,882,330	APBD	33%	1,574,347,723
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	BKD PROVINSI LAMPUNG	850 dokumen	46,000,000	APBD	850 berkas	50,715,000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	BKD PROVINSI LAMPUNG	15000 orang	103,963,330	APBD	15000 orang	134,846,555
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	95 orang	1,123,919,000	APBD	95 orang	1,388,786,168
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	70%	1,073,896,976	APBD	33%	1,172,011,537
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan serta PNS yang mengikuti uji kompetensi	BKD PROVINSI LAMPUNG	325 orang	656,050,000	APBD	595 orang	632,433,798
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Praja IPDN dan PNS yang terfasilitasi terkait pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	350 orang	326,110,976	APBD	150 orang	471,513,799
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	200 orang	91,736,000	APBD	200 orang	68,063,940

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Perkiraan Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	313,577,775	APBD	50%	368,771,367
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 dokumen	271,664,700	APBD	12 dokumen	314,407,643
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	BKD PROVINSI LAMPUNG	3 dokumen	41,913,075	APBD	3 dokumen	54,363,724

Telukbetung, Oktober 2021  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,

YURNALIS, S.IP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19690710 199003 1 006





